

## **BAB II KAJIAN LITERATUR**

### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh (Aini & Anggraini, 2024) mengenai implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG) pada perbankan syariah menunjukkan bahwa integrasi ESG tidak dapat dilepaskan dari kesiapan internal lembaga. Penelitian ini mengkaji pemahaman pegawai, kejelasan kebijakan, serta kemampuan manajerial dalam merespons tuntutan keberlanjutan yang semakin meningkat. Metode penelitian yang digunakan menitikberatkan pada analisis terhadap praktik operasional dan pedoman internal lembaga untuk menilai sejauh mana aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola telah dijalankan (Meiden & Silaban, 2023). Hasil penelitian tersebut menyoroti bahwa pemahaman pegawai mengenai ESG masih belum merata, sehingga diperlukan pelatihan yang berkelanjutan untuk memperkuat implementasinya. Temuan ini memperkuat argumen bahwa lembaga keuangan syariah memerlukan kesiapan sumber daya manusia dan kebijakan internal yang memadai agar penerapan ESG dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan (Radin et al., 2024).

Penelitian Kajian lain oleh (Harahap et al., 2022) menelaah kesiapan lembaga keuangan syariah dalam menerapkan ESG melalui identifikasi tantangan yang meliputi aspek pelaporan, infrastruktur teknologi, serta komitmen kelembagaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun banyak lembaga telah memahami urgensi ESG, proses implementasinya masih belum seragam dan cenderung dilakukan secara bertahap. Penelitian tersebut menyatakan bahwa penguatan sistem dokumentasi dan pelaporan menjadi aspek penting yang harus diperbaiki agar implementasi ESG dapat diukur secara objektif. Temuan ini menunjukkan bahwa dukungan kebijakan dan kerangka regulasi memiliki peran penting dalam

mempercepat kesiapan lembaga keuangan syariah, khususnya dalam penyusunan laporan keberlanjutan dan penguatan tata kelola.

Dari perspektif sektor yang diteliti, (Adirestuty et al., 2024) mengangkat konsep green banking dalam konteks perbankan syariah. Penelitian ini berfokus pada peluang bagi lembaga keuangan syariah untuk menerapkan praktik ramah lingkungan, seperti penghematan energi, pengurangan jejak karbon, dan pembiayaan yang berwawasan ekologi. Namun, penelitian tersebut juga mengungkap berbagai tantangan, seperti minimnya pedoman teknis dan belum adanya standar operasional yang baku. Penelitian (Hidayat et al., 2024) menegaskan peran strategis inovasi keuangan dan digitalisasi dalam mendukung keberlanjutan, khususnya dalam mengurangi penggunaan kertas dan meningkatkan efisiensi layanan perbankan syariah. Sementara itu, (Prabawati & Rahmawati, 2022) menyoroti peran teknologi dan tata kelola dalam menciptakan sistem operasional perbankan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Penelitian ini berpendapat bahwa inovasi bukan hanya aspek teknis, tetapi juga strategi penting untuk memperkuat dimensi environmental dan governance dalam ESG.

Penelitian mengenai aspek sosial dilakukan oleh (Harahap et al., 2022) yang mengulas bagaimana lembaga keuangan syariah memaknai tanggung jawab sosial melalui pemberdayaan masyarakat dan pembiayaan yang berkeadilan. Penelitian ini menegaskan bahwa dimensi sosial memiliki posisi dominan dalam perbankan syariah karena berhubungan langsung dengan prinsip masalah dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan (Maulana et al., 2025) yang mengulas pentingnya tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berintegritas sebagai dasar dalam membangun kepercayaan publik terhadap perbankan syariah. Kedua penelitian ini menegaskan bahwa ESG tidak hanya dilihat dari aspek lingkungan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh relasi sosial dan etika kelembagaan. Pandangan tersebut diperkuat oleh (Adirestuty et al., 2024)

yang menghubungkan implementasi ESG dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan nilai-nilai keadilan dalam keuangan syariah.

Beberapa penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam perbankan syariah memiliki keselarasan konseptual dengan nilai-nilai syariah, namun masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Penelitian (Aini & Anggraini, 2024) mengungkapkan bahwa penerapan ESG pada Bank Syariah Indonesia telah dilakukan secara cukup sistematis dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepercayaan nasabah serta reputasi bank, meskipun masih ditemukan kendala dalam aspek pengukuran dan pelaporan kinerja ESG. Temuan tersebut sejalan dengan (Harahap et al., 2022) yang menyatakan bahwa meskipun ESG selaras dengan nilai keadilan dan tanggung jawab sosial dalam perbankan syariah, implementasinya masih terkendala oleh keterbatasan standar dan kesiapan kelembagaan.

Selain itu, (Adirestuty et al., 2024) menegaskan bahwa integrasi ESG dalam keuangan syariah berpotensi mendukung pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah, namun masih dihadapkan pada kesenjangan standar dan keterbatasan regulasi yang mengakomodasi prinsip syariah secara komprehensif. Temuan ini diperkuat oleh (Maulana et al., 2025) yang menunjukkan bahwa penerapan ESG dalam perbankan syariah di Indonesia masih bersifat parsial dan lebih menitikberatkan pada aspek lingkungan, sementara aspek sosial dan tata kelola belum terintegrasi secara optimal dalam strategi keberlanjutan bank. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa implementasi ESG pada perbankan syariah masih memerlukan penguatan secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, penelitian terdahulu menunjukkan pola yang relatif konsisten bahwa penerapan Environmental, Social, and Governance (ESG) memiliki potensi signifikan dalam memperkuat transparansi,

akuntabilitas, serta keberlanjutan operasional lembaga keuangan syariah. Namun demikian, tingkat implementasi ESG masih menunjukkan variasi yang cukup besar antar lembaga. Lembaga keuangan syariah berskala besar umumnya memiliki kesiapan yang lebih baik dari sisi pelaporan, pemanfaatan teknologi, dan struktur tata kelola, sementara BPRS masih berada pada tahap awal penerapan dan cenderung berfokus pada langkah-langkah dasar seperti efisiensi operasional, digitalisasi sederhana, serta pelaksanaan program sosial berskala lokal. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa implementasi ESG sangat dipengaruhi oleh kapasitas internal lembaga, dukungan regulasi, serta karakteristik masyarakat yang dilayani. Dengan demikian, penelitian ini menempati posisi penting dalam mengisi celah literatur terkait bagaimana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Arsa Sejahtera Batu menerapkan ESG dalam konteks operasional lembaga keuangan syariah berskala mikro. Dalam sistem perbankan syariah di Indonesia, BPRS dikategorikan sebagai lembaga keuangan mikro yang memiliki cakupan usaha, permodalan, dan kompleksitas operasional yang lebih terbatas dibandingkan bank syariah berskala menengah maupun bank syariah berskala besar (bank umum syariah). Perbedaan skala tersebut memengaruhi kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, serta kesiapan dalam mengimplementasikan ESG secara formal dan terstruktur. Oleh karena itu, penelitian ini mempertimbangkan dinamika lokal, keterbatasan sumber daya, serta kondisi sosial ekonomi nasabah yang dilayani sebagai karakteristik utama dalam memahami implementasi ESG pada perbankan syariah berskala mikro.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Stakeholder Teori**

Stakeholder Theory menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham (shareholders),

tetapi juga kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap aktivitas perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti karyawan, nasabah, pemerintah, masyarakat, dan lingkungan (Freeman, 1984). Teori ini menekankan bahwa keberlanjutan organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajemen dalam mengelola kepentingan para pemangku kepentingan secara seimbang.

Dalam sektor keuangan, khususnya perbankan, Stakeholder Theory menjadi sangat relevan karena aktivitas bank memiliki dampak luas terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Keputusan perbankan tidak hanya memengaruhi kinerja keuangan internal, tetapi juga tingkat kepercayaan publik dan keberlanjutan sosial (Donaldson & Preston, 1995).

Bagi perbankan syariah, Stakeholder Theory memiliki kesesuaian yang kuat dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan (adl), amanah, dan kemaslahatan. Perbankan syariah tidak semata-mata berorientasi pada profit, tetapi juga bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Chapra, 2008). Oleh karena itu, teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan urgensi penerapan ESG dalam operasional perbankan syariah.

### **2.2.2 Teori Integrasi ESG dalam Perbankan Syariah**

Integrasi ESG dalam perbankan syariah dapat dipahami sebagai proses penyelarasan prinsip keberlanjutan dengan nilai-nilai syariah yang menjadi dasar operasional lembaga keuangan Islam. Secara konseptual, prinsip ESG sejalan dengan maqasid syariah yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia dan lingkungan (Dusuki & Abdullah, 2007).

Perbankan syariah menolak praktik ekonomi yang merugikan masyarakat dan lingkungan, serta mendorong keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Hal ini menunjukkan

bahwa penerapan ESG dalam perbankan syariah bukan merupakan konsep asing, melainkan penguatan nilai-nilai syariah dalam konteks bisnis modern (Elkington, 1997).

Dalam praktiknya, integrasi ESG pada perbankan syariah dapat diwujudkan melalui pembiayaan UMKM, kegiatan sosial, serta penerapan tata kelola yang akuntabel dan sesuai prinsip syariah. Namun, pada lembaga keuangan syariah berskala mikro seperti BPRS, integrasi ESG umumnya dilakukan secara bertahap dan kontekstual, menyesuaikan dengan keterbatasan sumber daya dan struktur organisasi (Harahap et al., 2022).

Dengan demikian, teori integrasi ESG dalam perbankan syariah menempatkan ESG sebagai kerangka pendukung yang memperkuat operasional bank agar selaras dengan prinsip syariah, kepentingan pemangku kepentingan, dan tujuan keberlanjutan jangka panjang.

### **2.2.3 Pengertian Environmental, Social, and Governance (ESG)**

Konsep Environmental, Social, and Governance atau ESG merupakan kerangka yang digunakan untuk menilai sejauh mana organisasi memperhatikan tanggung jawab terhadap lingkungan, sosial, serta tata kelola dalam menjalankan aktivitasnya (Pamungkas & Risman, 2024). ESG berkembang menjadi instrumen penting bagi dunia bisnis modern karena memberikan arah bagi lembaga untuk mencapai keberlanjutan jangka panjang dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kepedulian sosial (Zhao, 2024). Dalam konteks lembaga keuangan, penerapan ESG bukan sekadar tuntutan regulasi, melainkan juga strategi untuk memperkuat reputasi, meningkatkan akuntabilitas, dan membangun kepercayaan publik (Yu, 2023).

Aspek lingkungan (environmental) dalam ESG berkaitan dengan bagaimana lembaga mengelola dampak aktivitasnya

terhadap alam. Hal ini mencakup upaya efisiensi energi, pengelolaan limbah, serta kontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim (Meiden & Silaban, 2023). Lembaga keuangan yang memperhatikan aspek lingkungan cenderung memiliki risiko bisnis yang lebih rendah karena mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya yang menjadi bagian dari kegiatan operasionalnya. Pada tingkat BPRS, penerapan prinsip lingkungan dapat diwujudkan melalui digitalisasi layanan, penghematan kertas, serta pembiayaan bagi usaha kecil yang berorientasi pada kelestarian alam (Ma'ruf et al., 2022).

Aspek sosial (social) menekankan pentingnya hubungan yang harmonis antara lembaga dan masyarakat. Dalam hal ini, lembaga diharapkan melaksanakan tanggung jawab sosial dengan menciptakan nilai tambah bagi karyawan, nasabah, dan komunitas sekitar. Di lembaga keuangan syariah, dimensi sosial memiliki makna religius karena mencerminkan prinsip masalah dan adl atau keadilan sosial yang menjadi landasan etika Islam (Hs, 2021). Sementara itu, aspek tata kelola (governance) menitikberatkan pada penerapan sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas dalam seluruh aktivitas organisasi (Maulana et al., 2025). Penerapan tata kelola yang baik atau good governance penting untuk menjamin kepercayaan publik dan memastikan setiap keputusan bisnis sesuai dengan prinsip syariah serta ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, ESG dapat dipandang sebagai pendekatan komprehensif yang menggabungkan keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan tata kelola yang etis guna mencapai keseimbangan antara profit dan kemaslahatan (Ma'ruf et al., 2022).